

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman menuntut aspek kehidupan ikut mengalami perubahan. Perubahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman banyak menarik perhatian orang banyak, Salah satu yang menarik banyak peminat adalah internet. Internet merupakan sistem global daripada seluruh jaringan komputer yang terhubung dengan menggunakan standar *internet protocol suite*. Manfaat daripada hadirnya internet ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, salah satunya adalah untuk bisnis atau perdagangan.

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang dilakukan melalui internet berkembang dengan munculnya metode pembayaran baru menggunakan kertas atau *paperless*. Pembayaran tersebut dimulai menggunakan *e-banking*, *internet banking*, sampai menggunakan *bitcoin*, *ripples*, *ethereum*, *litecoin*.

Uang virtual menjadi fenomena dimasyarakat, hal ini dikarenakan kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi daripada perkembangan teknologi kegiatan *e-commerce*. Mata uang kripto merupakan beberapa rangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik

dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial.¹

Bitcoin merupakan jaringan pembayaran yang berbasis *peer to peer* dan *open source* pada setiap transaksi tercatat dan tersimpan dalam database jaringan *bitcoin*. Jaringan *bitcoin* dikelola oleh penambang *bitcoin* yang biasa disebut dengan miner, dimana miner merupakan operator yang melakukan verifikasi jaringan deentralisasi *bitcoin*.²

Pada tahun 2017 *bitcoin* menguasai dominasi pasar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar \$11,495,123,941 dengan harga \$720 untuk 1 *bitcoin*. Selain *bitcoin*, *ethereum* dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar \$906,808,144 dengan harga \$11 untuk 1 *athereum*, Dominasi *bitcoin* tidak lepas daripada kedudukannya sebagai pionir daripada mata uang kripto.³

Uang eletronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah uang disimpan dalam satu transaksi elektronik.⁴

Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh

¹ Axel Yohandi, *et.all*, *Implikasi Yuridis Penggunaan mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*, Jurnal Hukum Diponegoro: Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, Website :

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

² Oscar Darmawan, 2014, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom, hal. 33.

³ Coin Market Cap, Crypto-Currency Market Capitalizations, <http://coinmarketcap.com>

⁴ Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 1.

dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, Black Coin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan*

Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik. Kemudian, pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Terkait dengan *bitcoin* ini, Bank Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya menyatakan: *No: 16/ 6 /Dkom Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.*

Selain itu menurut Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk *bitcoin*).

Pada hukum Islam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Jual-Beli Mata Uang (Al-Sharf) di-syari'atkan dengan ketentuan yaitu: a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*); d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kesimpulannya adalah bahwa *bitcoin* bukan merupakan benda atau objek yang di klasifikasikan mengenai haram dalam penggunaannya, hal ini dikarenakan *bitcoin* merupakan sebuah *software*. Akan tetapi jika *bitcoin* digunakan dalam praktik jual beli, maka banyak hal yang mengandung unsur pelarangannya dalam Islam seperti terjadinya prakti *maisir* yang direkayasa, terdapat unsur *gharar* pada benda yang diperjual-belikan, serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan bagi pengguna.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi: “**Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum negara dan Islam terhadap transaksi jual beli barang komoditi dengan menggunakan *bitcoin*?
2. Bagaimana kedudukan hukum *bitcoin* sebagai *virtual currency*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum negara dan Islam terhadap transaksi jual beli barang komoditi dengan menggunakan *bitcoin*.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum pada *bitcoin* sebagai *virtual currency*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pribadi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai Legalitas *Bitcoin* Sebagai *Virtual Currency*.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur Legalitas *Bitcoin* Sebagai *Virtual Currency*.

3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bias dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat tentang Legalitas *Bitcoin* Sebagai *Virtual Currency*.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau

beberapa gejala hukumnya.⁵ Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Legalitas *Bitcoin* Sebagai *Virtual Currency*.⁶⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Legalitas *Bitcoin* Sebagai *Virtual Currency*.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.

⁷ .

- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual-Beli Mata Uang (Al-Sharf)
- d) Perjanjian Jual beli *Bitcoin* (draft atau alat bukti elektronik yang saha).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan Legalitas *Bitcoin* Sebagai *Virtual*

Currency.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁸

a) Studi Pustaka

Metode pengumpuln data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian Legalitas *Bitcoin* Sebagai *Virtual Currency*.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu : *Pertama* mereduksi data, reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan pada saat mengumpulkan data. *Kedua*

⁸ Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

menyajikan data, Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang dapat berupa data kasar seperti jenis matrik, skema, gambar, tabel, dan sebagainya. *Ketiga* menarik kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah proses dimana penulis menyimpulkan apa yang sudah diketahui sebelumnya.⁹ Hasil analisis yang telah didapatkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan

Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian
 - 3. Asas Perjanjian
 - 4. Unsur Perjanjian

⁹ Nurhayati, N. (2010). *Pelaksanaan penyusunan program legislasi daerah Kota Surakarta untuk menunjang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), hal 14.

B. Tinjauan Tentang Jual Beli Elektronik

1. Pengertian Jual Beli Elektronik
2. Subyek dan Obyek Jual Beli Elektronik
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

C. Tinjauan Tentang *Virtual Currency*

1. Pengertian *Virtual Currency*
2. Jenis *Virtual Currency*
3. Proses Transaksi *Virtual Currency*

D. Tinjauan Tentang *Bitcoin*

E. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Elektronik

1. Litigasi
2. Non Litigasi

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Negara Dan Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Barang
Komoditi Dengan Menggunakan *Bitcoin*

B. Analisis Mengenai Kedudukan Hukum *Bitcoin* Sebagai *Virtual Currency*

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup